



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,  
Website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**KETERANGAN PERS  
Nomor: 26/HM.00/VIII/2021**

**Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2020  
“Pandemi Covid-19 Bukan Halangan bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi  
Manusia”**

Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, Komnas HAM RI tetap menjalankan mandatnya dalam mengupayakan terciptanya situasi yang kondusif bagi pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Sepanjang 2020 dimana pandemi Covid 19 telah menjadi ancaman bagi pemenuhan dan perlindungan HAM khususnya hak atas kesehatan dan hak atas hidup, Komnas HAM telah menyampaikan 18 butir rekomendasi kepada Presiden RI Joko Widodo pada 30 Maret 2020. Komnas HAM mendesak agar pemerintah melakukan perbaikan secara terus menerus supaya tata kelola penanggulangan Covid-19 berbasis pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Melalui fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM juga berupaya untuk merespon aspirasi masyarakat yang muncul di tengah situasi pandemi Covid-19, antara lain dengan melakukan kajian atas RUU Cipta Kerja dan berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan agar selaras dengan prinsip dan norma-norma HAM.

Komnas HAM RI telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Kesehatan dan SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai panduan dan penafsiran Komnas HAM RI agar pelaksanaan dan perlindungan atas hak-hak tersebut berjalan dengan kondusif sebagaimana menjadi mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Melalui fungsi penyuluhan, diselenggarakan peringatan Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2020 yang diisi dengan pidato virtual Presiden RI Joko Widodo dan seruan kebangsaan para tokoh HAM, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam pidatonya yang berisi enam hal, Presiden RI berkomitmen untuk terus memajukan dan menegakkan HAM, baik dalam ranah hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Komnas HAM RI juga menyelenggarakan Festival HAM dengan tema “Menegakkan HAM di Masa Pandemi Covid 19: Tantangan dan Solusinya” di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada

17-19 Desember 2020. Kegiatan ini menghasilkan Deklarasi Banjarmasin untuk mendorong penghormatan dan pemenuhan HAM oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah dan pusat khususnya di masa pandemi Covid-19.

Pelatihan-pelatihan juga dilakukan oleh Komnas HAM dalam rangka meningkatkan kesadaran nilai-nilai hak asasi manusia, antara lain dilakukan terhadap kepolisian-kepolisian daerah, Detasemen Khusus 88, peserta pendidikan dan pelatihan bagi pimpinan Polri, dan pelatihan terkait kota/kabupaten ramah HAM serta pelatihan mekanisme pencegahan penyiksaan.

Komnas HAM RI menyadari pula tentang pentingnya peran media sosial di tengah arus informasi yang sangat deras, dengan terus mengembangkan website dan media sosial sebagai instrumen penting untuk menyampaikan pesan dan penyuluhan HAM kepada khalayak luas. Terkait ini, pemberitaan media atas Komnas HAM RI pada 2020 terjadi kenaikan signifikan bila dibandingkan periode 2019. Pada 2019, terdapat 345 pemberitaan terkait Komnas HAM RI, dan sedangkan pada 2020, terdapat 768 berita atau kenaikan sebesar 122%.

Terkait pengaduan masyarakat pada 2020, Komnas HAM RI menerima 2.841 kasus. Adapun pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian (758), korporasi (455) dan pemerintah daerah (276). Sedangkan hak yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan (1.025 kasus), hak atas keadilan (887 kasus), dan hak atas rasa aman (179 kasus).

Selama pandemi Covid-19, terdapat perbedaan yang signifikan terlihat pada metode dan jumlah konsultasi masyarakat pada 2019 dan 2020. Tahun 2019, Komnas HAM menerima 347 konsultasi melalui telepon, sedangkan tahun 2020 turun menjadi 278 konsultasi. Konsultasi dengan datang langsung yang pada 2019 sebanyak 541 konsultasi, pada 2020 menjadi 206 konsultasi, hal ini dikarenakan pembatasan pertemuan tatap muka.

Sementara itu, terjadi peningkatan yang signifikan untuk jumlah konsultasi pengaduan via online/surel, dari sebelumnya sebanyak 124 surel pada tahun 2019, menjadi sebanyak 320 konsultasi melalui online/surel pada 2020. Hal yang sama juga terlihat pada konsultasi via *Whatsapp* yang sebelumnya terdapat 580 konsultasi pada 2019, menjadi 876 konsultasi pada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa layanan online menjadi pilihan pengadu selama pandemi Covid-19.

Sedangkan terkait kasus yang ditangani melalui pemantauan dan penyelidikan, diantaranya adalah pembunuhan atas Pendeta Yeremia Zanambani di Papua, kematian enam orang laskar FPI di wilayah Karawang pada awal Desember 2020, berbagai konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional, dan berbagai peristiwa unjuk rasa masyarakat. Dalam berbagai peristiwa tersebut, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden RI dan para pemangku kepentingan terkait.

Sedangkan melalui fungsi mediasi pada 2020, Komnas HAM RI melakukan mediasi atas kasus terkait dengan sengketa yang melibatkan perusahaan/korporasi sebanyak 35 kasus, pemerintah daerah sebanyak 15 kasus, dan kasus BUMN/BUMD sebanyak 7 kasus. Sementara itu dari klasifikasi hak yang diduga dilanggar yang dimediasikan, kasus pelanggaran hak kesejahteraan menempati urutan pertama sebanyak 69 kasus, disusul dengan kasus dugaan pelanggaran hak atas kebebasan pribadi sebanyak 4 kasus.

Tekait tindak lanjut atas penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM RI terus mendorong dan berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti 12 peristiwa yang

telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM RI sesuai mandat UU tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM RI juga terus mencari dan mengusulkan format terbaik langkah penyelesaian kasus-kasus tersebut secara menyeluruh sesuai prinsip dan norma-norma HAM. Koordinasi secara intensif terus dilaksanakan bersama dengan Menko Polhukam RI.

Dalam melaksanakan mandatnya, selain Komnas HAM yang berkedudukan di DKI Jakarta sebagai kantor pusat, terdapat juga Kantor Perwakilan yang berkedudukan di enam wilayah yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Ke enam kantor perwakilan melakukan tugas-tugasnya terkait dengan pemajuan dan penegakan HAM di wilayahnya masing-masing. Komnas HAM berupaya untuk dapat menjangkau masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Masih banyak upaya yang harus dilakukan Komnas HAM RI dalam membangun situasi yang kondusif bagi pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk itu, Komnas HAM RI membangun kerjasama dari berbagai pihak, baik kementerian, lembaga, akademisi, masyarakat sipil dan lembaga-lembaga lainnya. Kerjasama dilakukan dengan berbagai lembaga di pusat dan daerah, juga dengan lembaga-lembaga regional dan internasional, diantaranya dengan Kantor Staf Presiden, Pemprov Sumatera Utara, *Danish Institute of Human Rights*, UNESCO, Serikat Pengajar HAM, INFID, *Asia Pacific Forum of Human Rights*, dan *South East Asia Forum on National Human Rights Institutions*.

Di tengah pandemi COVID 19 dan hambatan teknis yang telah dirasakan dampaknya selama ini, Komnas HAM terus berupaya untuk menciptakan strategi dan terobosan di tengah situasi pandemi Covid-19 sehingga dapat terus bekerja dan berkontribusi berdasarkan amanat yang telah diberikan oleh Konstitusi dan undang-undang.

Pada 2020, melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pelaksaaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, Komnas HAM RI mendapatkan indeks penilaian Reformasi Birokrasi yang meningkat daripada 2019, yaitu 70,97 atau kategori “BB”. Capaian baik ini harus dipertahankan dan ditingkatkan agar indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM terus lebih baik. Komnas HAM RI juga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 atau selama tiga tahun berturut-turut.

Situasi pemajuan dan penegakan HAM pada 2021 juga masih akan mendapatkan banyak tantangan, terutama oleh karena situasi pandemi Covid-19, dimana hak asasi manusia dibatasi untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan publik. Kemampuan keuangan negara juga tergerus untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga pemenuhan hak asasi manusia juga akan terhambat.

Tantangan lain adalah terkait dengan penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang belum sepenuhnya dijamin oleh negara, terutama terkait dengan keberadaan dari UU ITE dan aturan pelaksanaannya. Perlindungan atas data pribadi juga menjadi prioritas bagi pemerintah oleh karena banyaknya pencurian dan ekspose atas data pribadi yang melanggar hak asasi manusia.

Penanganan atas pandemi Covid-19 pada 2021 juga masih menjadi tantangan karena jumlah korban yang terinfeksi dan meninggal yang sangat tinggi, bahkan tertinggi di dunia, di atas 100 ribu orang meninggal. Hal ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah agar lebih maksimal dalam memenuhi dan melindungi hak atas kesehatan dan hak hidup setiap anggota masyarakat

termasuk para tenaga kesehatan. Pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia secara umum juga harus dijamin dalam situasi pandemi Covid-19 meskipun pembatasan hak asasi manusia diperkenankan dalam situasi darurat kesehatan. Namun Komnas HAM RI terus mengingatkan pemerintah agar pembatasan tersebut sesuai dengan koridor hukum dan prinsip hak asasi manusia.

Untuk itu, dengan kerjasama dan sinergi antar lembaga negara/kementerian dan berbagai elemen masyarakat termasuk melalui kerjasama internasional, banyak hal yang kiranya dapat dicapai untuk merespons pandemi Covid-19 dan memajukan serta menegakkan HAM di Negara Republik Indonesia yang akan segera memasuki usia yang ke 76 tahun.

**Jakarta, 12 Agustus 2021**

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Ketua,  
Ahmad Taufan Damanik**